

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN BELANJA MODAL
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI**

(Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011)



ARTIKEL PUBLIKASI

OLEH:

WINDHA AMIGA PERMANASARI

B 200 090 125

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2013



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 – Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417, Fax : 715448 Surakarta 57102

Website : <http://www.ums.ac.id>

Email : ums@ums.ac.id

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir :

Nama : **Drs. Yuli Tri Cahyono, SH, MM, Ak**

NIP/NIK : -

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa :

Nama : **WINDHA AMIGA PERMANASARI**

NIM : **B 200090125**

Fakultas/Jurusan : **FAKULTAS EKONOMI/ JURUSAN AKUNTANSI**

Judul Skripsi : **PENGARUH DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN
BELANJA MODAL
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2011)**

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, Juli 2013

Pembimbing



Drs. Yuli Tri Cahyono, SH, MM, Ak

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI KASUS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009-2011)

Windha Amiga Permanasari

B200090125

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: windha_amigaa91@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Sampel yang diperoleh sejumlah 105 laporan realisasi APBD serta PDRB harga konstan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, dengan model regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi

A. PENDAHULUAN

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut APBD, baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD memiliki fungsi yaitu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi.

Menurut Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian APBD harus mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah berisi informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran prestasi kerja (Yuwono, 2008:85).

Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan dan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan menstransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari DAU, DAK, dan bagian daerah dari hasil pajak pusat. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah.

PAD, DAU, dan DAK merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Maryati dan Endrawati, 2010).

Menurut penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007), pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian (Susanti dkk, 2000:23). Meningkatkan produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya dan secara mikro dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto perkapitanya (Djoyohadikusumo, 1994:1). PDRB dalam statistik disajikan dalam dua penilaian, yaitu atas harga berlaku (*at current market*) yaitu PDRB yang memasukkan faktor inflansi di dalamnya dan atas dasar harga konstan (*at constant market price*) yaitu PDRB yang sudah mengeliminasi faktor inflasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), PENDAPATAN ASLI

DAERAH (PAD), DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009-2011.”

B. LANDASAN TEORI

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan rencana keuangan daerah Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD serta ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan publik.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 15 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Menurut Darise (2006:143-150), struktur APBD terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli daerah (PAD)

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b. Dana Perimbangan

- 1) Dana Bagi Hasil
- 2) Dana Alokasi Umum
- 3) Dana Alokasi Khusus

c. Lain-lain pendapatan yang sah

2. Belanja daerah

3. Pembiayaan daerah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DAU adalah salah satu dana perimbangan yang

menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. DAU dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

DAU sebagai salah satu bagian dari dana perimbangan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemda. Menurut Mardiasmo (2002:142) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU kepada pemerintah daerah yaitu: (1) Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah, (2) Untuk meningkatkan akuntabilitas, (3) Untuk meningkatkan sistem pajak yang progresif, dan (4) Untuk meningkatkan keberterimaan pajak daerah.

Menurut UU No. 25 Tahun 1999, alokasi DAU ke suatu daerah ditetapkan berdasarkan dua faktor, yaitu potensi perekonomian dan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah (*fiscal need*) dicerminkan oleh jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat. Potensi perekonomian antara lain dicerminkan oleh potensi penerimaan pemerintah daerah (*fiscal capacity*), seperti dari hasil industri dan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan PDRB.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Halim (2002:65), DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang No. 104 Tahun 2000 Pasal 19 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi

masalah-masalah khusus. Menurut Halim (2001:58) menyatakan bahwa tujuan dari penggunaan DAK dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan IPM yang merupakan salah satu isu nasional yang perlu dituntaskan. Hal ini dikarenakan besarnya tingkat kemiskinan yang ada di daerah.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Darise (2006:43), PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Sumber-sumber PAD dibagi menjadi dua yaitu: pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Belanja Modal

Menurut Hamil (2002:72), belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi dua yaitu belanja publik dan belanja aparatur.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut penelitian Setiyawati (2007), pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Arsyad (1999:11), pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestik Product (GDP)* atau *Gross National Product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat

pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Menurut Pandangan ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Jhon Stuart Mill) ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: 1) Jumlah penduduk, 2) Jumlah stok barang-barang modal, 3) Luas tanah dan kekayaan alam, dan 4) tingkat teknologi yang digunakan.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 = DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

H_2 = DAK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

H_3 = PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

H_4 = Belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro dan Supomo (1999:147).

1. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data ini berupa arsip APBD dan data PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011.

2. Populasi dan sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah X 3

tahun = 105 tahun anggaran.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011:160). Pengujian ini dilakukan dengan *Kolmogrov Smirnov*. Hasil pengujian ini akan dibandingkan dengan nilai signifikan yang telah ditentukan yaitu sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011:105). Hasil uji multikolonieritas dapat ditunjukkan dengan nilai *varian inflation factor (VIF)* dan *tolerance value* dari tiap-tiap variabel independen. suatu model regresi menunjukkan tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai *VIF* di bawah 10 *tolerance value* di atas 0,1.

c. Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011:139). Pada penelitian ini untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji *Glesjer*. Apabila nilai signifikan yang diperoleh $> 0,05$, maka tidak ada masalah heterosketisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2011: 110). Untuk mendeteksinya terjadinya autokorelasi

adalah dengan menggunakan metode Durbin Waston yaitu dengan kriteria $du < d < 4 - du$.

4. Analisis Linear Berganda

Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$PDRB = \alpha + \beta_1 DAU + \beta_2 DAK + \beta_3 PAD + \beta_4 BM + \varepsilon$$

Keterangan:

PDRB = Pertumbuhan Ekonomi

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BM = Belanja modal

ε = Error Term

5. Pengujian Hipotesis

a. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Tujuan dari pengujian F adalah selain untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan, juga untuk mengetahui apakah model regresi fit atau tidak.

b. Uji R^2

Uji Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Penelitian ini menggunakan adjusted- R^2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted- R^2 makin independennya, mendekati 1, maka semakin baik

kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel independennya.

c. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Uji statistik t ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

D. ANALISIS DATA

a. Uji Asumsi Klasik

Pengujian model persamaan regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik dengan diperoleh hasil model terdistribusi normal, bebas dari multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

b. Pengujian Hipotesis

Dari uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti bahwa secara simultan seluruh variabel independen: DAU, DAK, PAD, dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Dengan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan fit.

Dari Uji R^2 menghasilkan nilai sebesar 0,395. hal ini menunjukkan bahwa sekitar 39,5% variasi dari pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel DAU, DAK, PAD, dan belanja modal, sedangkan sisanya 60,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

E. PEMBAHASAN

1. Pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Penelitian ini

konsisten dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fabianus (2012), Maryati (2010), serta Setyawati (2007). Hal ini berarti semakin tinggi DAU yang diterima pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena peran DAU sangat signifikan, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU. Setiap DAU yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah untuk belanja modal. Hal ini tidak jauh beda dari peran PAD yaitu dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi

DAK berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dari hasil uji t diperoleh dari nilai signifikan sebesar $0,451 > \alpha = 0,05$. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Maryati (2010), Setyawati (2007), serta Akbar (2012). Hal ini disebabkan nilai DAK yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan, dan lain-lain. Artinya tidak boleh disalahgunakan/digunakan untuk kegiatan di luar ketentuan.

3. Berpengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi

PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dari hasil uji t diperoleh dari nilai signifikan sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Maryati (2010), Adi (2006), serta Setyawati (2007). Hal ini berarti semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan tingkat PAD yang tinggi, maka pemerintah daerah lebih bisa untuk mengoptimalkan potensi PAD tersebut. Karena PAD merupakan salah satu sumber

pembelanjaan daerah, Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki. Salah satunya dengan cara memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan. Dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Berpengaruh Belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi

Belanja modal berpengaruh tidak signifikan (secara statistik) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dari hasil uji t diperoleh dari nilai signifikan sebesar $0,940 > \alpha = 0,05$. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Setyawati (2007), Syahri (2010), Mar'i isa (2010), serta Akbar (2012). Hal ini disebabkan belanja modal yang digunakan pemerintah daerah dialokasikan pada belanja infrastruktur yang kurang produktif, dapat juga disebabkan hasil alokasi belanja modal belum dapat dinikmati dalam kurun waktu yang pendek/pembangunan infrastruktur masih berjalan sehingga belum memperoleh hasil dari belanja modal tersebut.

F. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh DAU, DAK, PAD, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- a. DAU berpengaruh (secara statistik) signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- b. DAK berpengaruh (secara statistik) tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- c. PAD berpengaruh (secara statistik) signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

- d. Belanja modal berpengaruh (secara statistik) tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan dalam mengambil jumlah sampel penelitian, yaitu terbatas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan di daerah lainnya belum dimasukkan, sehingga tingkat generalasinya kurang dan hasilnya akan berbeda jika diterapkan pada populasi yang lebih luas.
- b. Periode penelitian ini dibatasi hanya dari tahun 2009, 2010, dan 2011, sehingga tingkat generalasinya kurang baik.
- c. Variabel yang diteliti hanya terbatas pada DAU, DAK, PAD, dan belanja modal, sehingga masih terdapat variabel lain yang kemungkinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

3. Saran

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan, dan simpulan yang telah diambil, maka dapat di kemukakan saran sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti mendatang hendaknya sampel dan daerah penelitian lebih diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga akan memberikan hasil yang lebih mendekati kenyataan yang sebenarnya.
- b. Bagi peneliti di penelitian lebih diperpanjang lagi, yaitu tidak hanya tiga tahun, sehingga tingkat generalasinya lebih baik.
- c. Bagi peneliti mendatang hendaknya melibatkan variabel lainnya, karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi 9, Agustus 2006.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta:Penerbit BPFE.
- Boediono. 1982. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta:Penerbit BPFE.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT INDEKS.
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X, Juli 2007.
- Ghozali, Imam. 2010. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Universitas Ponegoro. Semarang.
- Hartono, Fabianus Wiradi. 2012. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi DIY*. Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. UGM. Yogyakarta.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X, Juli 2007.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, UGM.
- Mar'i isa, Filzah. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Utara*. Skripsi

Sarjana (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, vol 5, No. 2, Desember 2010.

Pramukti, Eria Syahri. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di indonesia*. Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Sukirno, Sadono. 1981. *Pengantar Teori Makroekonomi*. UI

Setiyawati, Anis dan Ardi Hamzah. 2007. *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur*. Jurnal Akutansi dan Keuangan Indonesia, vol 4, No. 2, Desember 2007.

Saragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama, Yogyakarta, Andi.

Suparmoko, M. 1991. *Pengantar Ekonomika Makro*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Penerbit BPFE.

Syafitri, Irma. 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta Erlangga.

Undang-Undang No 25 Tahun 1999. *Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah*.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang No 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang No 104 Tahun 2000. *Dana Perimbangan*.

Yuwono, Sony, dkk. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Edisi Pertama. Malang. Bayumedia Publishing.

www.djkd.depkeu.go.id

www.jateng.bps.go.id